

***THE IMPACT OF REGIONAL INCOME, POVERTY AND  
GOVERNMENT TYPE ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX  
IN EAST JAVA : AN OLS REGRESSION ANALYSIS***

**Moh. Amru<sup>1</sup>; Unggul Heriqbaldi<sup>2</sup>**

Universitas Airlangga, Surabaya<sup>1,2</sup>

Email : moh.amru-2022@feb.unair.ac.id<sup>1</sup>; u.heriqbaldi@feb.unair.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Sasaran utama Bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Proses pembangunan idealnya bersifat komprehensif dan bersinambungan guna meningkatkan taraf hidup serta kualitas penduduk. Akan tetapi, realitas di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya disparitas yang mencolok dalam aspek pembangunan sumber daya manusia antar wilayah kabupaten dan kota. Fenomena kesenjangan ini memicu dilakukannya sebuah studi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Tujuan dari studi untuk mengetahui pengaruh realisasi pendapatan daerah, kemiskinan, dan jenis pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Studi ini mengolah data dari 38 wilayah administratif di Jawa Timur (29 kabupaten dan 9 kota) selama tahun 2023 dengan *ordinary least square* (OLS) sebagai metodenya. Data diambil dari 29 kabupaten dan 9 kota pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur dengan *ordinary least square* (OLS) sebagai metodenya. Studi ini menemukan bahwa realisasi pendapatan daerah berkorelasi positif dan signifikan, sedangkan kemiskinan berkorelasi negatif dan signifikan terhadap IPM. Selain itu, pengaruh signifikan pemerintah kabupaten lebih rendah daripada kota terhadap IPM. Hal itu menandakan bahwa akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan jauh lebih baik yang ada di kota, seharusnya perbaikan diprioritas ke pemerintah kabupaten terlebih dulu. Karena daerah-daerah tersebut seharusnya memiliki perhatian khusus agar bisa meningkatkan pemerataan pada pembangunan manusia. Dengan demikian, pembangunan yang semakin merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tercapai hidup yang lebih baik.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Realisasi Pendapatan Daerah; Kemiskinan; Jenis Pemerintah Kabupaten atau Kota

**ABSTRACT**

*The primary objective of the Indonesian nation is to advance public welfare through a comprehensive and sustainable development process aimed at elevating living standards and population quality. However, the reality in East Java Province reveals stark disparities in human resource development across regencies and cities. This phenomenon of inequality has prompted a study to identify variables influencing the Human Development Index (HDI). The research aims to determine the impact of regional revenue realization, poverty levels, and local government types on the HDI. Utilizing Ordinary Least Squares (OLS) methodology, this study analyzed data from 38 administrative regions in East Java (29 regencies and 9 cities) for the year 2023. The findings indicate a significant positive correlation between regional revenue realization and HDI, while poverty demonstrates a significant negative correlation. Furthermore, the study reveals that regency governments have a significantly lower impact on HDI compared to city governments, suggesting superior access to education, healthcare, and*

*income opportunities in urban areas. This disparity underscores the need for prioritizing improvements in regency administrations to enhance human development equity. Consequently, a more balanced development approach is essential to improve societal welfare and achieve a higher quality of life for all society.*

*Keywords : Human Development Index (HDI); Realized Regional Income; Poverty; Type of District or City Government*

## PENDAHULUAN

Sasaran utama Bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional menjadi langkah strategis dalam upaya mewujudkan cita-cita ini. Pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dan berkesinambungan diperlukan untuk peningkatan taraf hidup serta kualitas kehidupan masyarakat. Indikator yang dipakai untuk keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Penilaian kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui IPM didasari dari beberapa aspek penting yang mencerminkan kualitas hidupnya. Aspek-aspek ini mencakup kesehatan, taraf edukasi, serta tingkat kesejahteraan ekonomi yang layak. (Latupeirissa & Djami, 2010).

Pada tahun 1996, UNDP dalam laporan Human Development Report memperkenalkan kemunculan konsep IPM. Setelah itu, konsep tersebut dipublikasikan secara tahunan (Setiawan & Hakim, 2008). Tujuan dari memperkenalkan konsep tersebut adalah sebagai indikator dalam mengukur kualitas modal manusia (Dewi & Sutrisna, 2012). Terdapat tiga aspek utama pembangunan manusia yang terkandung dalam IPM yaitu aspek kesehatan indikator pengukuran dari angka harapan hidup, aspek pendidikan yang dinilai dari tingkat literasi dan rata-rata lama sekolah, serta aspek ekonomi yang mencerminkan standar kelayakan hidup seorang dan tolak ukur yang dipakai dari paritas daya beli (UNDP, 2004; Dewi & Sutrisna, 2012). Indeks ini mampu menggambarkan kondisi kualitas hidup penduduk dari aspek kualitatif (non-ekonomi) dan kuantitatif (ekonomi) (Siswati & Hermawati, 2018). Kualitas pengembangan sumber daya manusia yang unggul memainkan peran krusial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengadopsi dan memanfaatkan berbagai faktor pendorong kemajuan ekonomi. Hal ini mencakup kemampuan dalam menguasai aspek teknologi serta memahami struktur kelembagaan, yang keduanya merupakan komponen vital dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Dewi & Sutrisna, 2012).

Pada tingkat daerah, pemerintah setempat juga melakukan upaya pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Fokus utama pembangunan daerah

salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang diukur menggunakan IPM. IPM berfungsi sebagai tolak ukur dalam pencapaian pembangunan sumber daya manusia berdasarkan elemen dasar kelayakan hidup. Meskipun demikian, ekspansi demografi secara berlebihan dapat menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Putra & Ratnasari, 2015).

Badan Pusat Statistik 2024 melaporkan IPM di wilayah Jawa Timur mencapai 73,38 pada tahun lalu. Meski angka ini tergolong tinggi, namun masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 74,39, dengan perbedaan 1,01 poin. Perkembangan sumber daya manusia di berbagai daerah provinsi ini menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan. Kesenjangan tersebut nampak terlihat jelas saat membandingkan nilai IPM dari lima wilayah dengan indeks tertinggi dan terendah. Pada nilai IPM tertinggi terdiri dari Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Blitar yaitu sebesar 83,45; 83,39; 82,71; 81,55; dan 80,62 yang tergolong sangat tinggi, sedangkan nilai IPM terbawah terdiri dari Kabupaten Sampang, Bangkalan, Probolinggo, Lumajang, dan Pamekasan yaitu sebesar 64,13; 65,75; 67,79; 67,87; dan 67,96 yang masuk dalam kategori sedang. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius. Diperlukan studi mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPM di setiap wilayah administratif Jawa Timur, guna merumuskan strategi peningkatan yang lebih efektif dan merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian adalah untuk menemukan pengaruh realisasi pendapatan daerah, kemiskinan, dan jenis pemerintah terhadap IPM. Hasil penemuan pada penelitian diharapkan sebagai preferensi dalam pengambilan kebijakan untuk pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah daerah, provinsi, serta dinas terkait. Dengan demikian, masyarakat daerah dapat meningkatkan kesejahteraan agar mencapai hidup yang lebih baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Landasan Teori**

#### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Sebagai alat evaluasi yang komprehensif, IPM dimanfaatkan untuk mengukur pencapaian pembangunan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi

masyarakat. Aspek sosial dievaluasi melalui bidang edukasi dan kesehatan, sementara aspek ekonomi diukur menggunakan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan. Penggunaan kedua perspektif ini memungkinkan IPM untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan akurat mengenai kondisi pembangunan yang sebenarnya (Todaro & Smith, 2017). Secara global, indikator pengukuran IPM yaitu dengan pencapaian di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM global, seperti yang disajikan dalam *Human Development Report* (HDR) 2010, mengukur keberhasilan suatu negara dalam memberikan warganya umur panjang dan sehat (menggunakan data kesehatan), akses terhadap pengetahuan (menggunakan data pendidikan), dan standar hidup yang layak (menggunakan pendapatan perkapita) (Shi & Tang, 2020; UNDP, 2010). Terdapat pola nilai yang berbeda di setiap negara, yang berarti bahwa beberapa negara mungkin lebih menekankan pada hasil pembangunan tertentu dibanding negara lain (Kroll, 2015).

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (2024), metode perhitungan di Indonesia menggunakan perhitungan rata-rata ketiga dimensi IPM diganti dengan rata-rata geometrik. Pada rumus pengganti, setiap dimensi berbobot sama dan tak ada satupun terdapat transfer capaian dari aspek yang bernilai tinggi ke aspek yang bernilai rendah. Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia suatu wilayah diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklarifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah menurut pembangunan manusianya. Adapun capaian IPM suatu wilayah dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori:

(1) Sangat tinggi (Angka IPM  $\geq 80$ ); (2) Tinggi (70 – 79); (3) Sedang (60 – 69); (4) Rendah ( $\leq 60$ ).

### **Pendapatan Daerah**

Dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban serta melaksanakan amanah rakyat, pemerintah perlu menyusun rencana yang komprehensif untuk mencapai cita-cita bangsa. Rencana-rencana yang telah dirumuskan dengan seksama ini akan berfungsi sebagai panduan dalam setiap tahap pelaksanaan tugas negara. Mengingat pentingnya hal tersebut, pemerintah harus merancang rencana keuangan negara yang kemudian diwujudkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997; Rahmawati, 2010: 10; Asprino, 2017).

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pungutan wajib daerah (pajak daerah), iuran wajib untuk layanan daerah, serta berbagai jenis dana dari pemerintah pusat seperti Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Desmawati, Zamzami, & Zulgani (2016) menyoroti adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD. Mereka berpendapat bahwa dana yang dihimpun dari wilayah setempat idealnya menjadi motor utama pembiayaan proyek-proyek pemerintah daerah (Irviani, Jatiningrum, & Kasmi, 2019).

### **Kemiskinan**

Ketiadaan sumber daya finansial dan kebutuhan mendasar untuk mencapai taraf hidup minimal disebut kemiskinan, yang dapat dialami oleh individu maupun kelompok masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan minimnya pemasukan, yang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mencakup pangan, air bersih, sanitasi yang layak, pelayanan kesehatan, tempat bernaung, akses pendidikan, serta informasi (Asadullah, Mansor, & Savoia, 2021). Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Untuk mengukurnya secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga dimensi-dimensi lain yang mencerminkan standar hidup yang layak. Villar (2023) dalam jurnalnya mengusulkan pengukuran kemiskinan berbasis kesejahteraan (*welfare poverty measurement*) yang mempertimbangkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan material.

Nufus & Yazid (2023) mengidentifikasi dua jenis kemiskinan yang berbeda: kemiskinan struktural dan kemiskinan budaya. Kemiskinan struktural terjadi akibat pengelolaan sumber daya yang tidak efektif dan terbatasnya akses terhadap sumber daya tersebut. Sementara itu, kemiskinan budaya berkaitan dengan sikap mudah menyerah dan kurangnya upaya dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, penelitian Salsabila *et al.*, (2022) menggunakan metode geometri menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Fenomena ini selaras dengan pemikirab Malthus, yang mengungkapkan bahwa peningkatan populasi yang cepat bisa menjadi penyebab utama

timbulnya kemiskinan di suatu daerah. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk dianggap sebagai kontributor terbesar terhadap meningkatnya angka kemiskinan..

### **Jenis Pemerintah (Urbanisasi)**

Perpindahan desa ke kota dari daerah pedesaan yang miskin ke daerah perkotaan yang kaya telah menjadi bentuk migrasi yang dominan. Tren migrasi desa-kota di Indonesia dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor pendorong dan penarik (Wajdi, Mulder, & Adioetomo, 2017). Meskipun permintaan tenaga kerja di pusat-pusat kota merupakan faktor penarik utama bagi orang-orang untuk pindah dari desa ke kota, Susanti & Damayanti (2015), dan Sukamdi & Mujahid (2015) merangkum faktor pendorong utama migrasi internal di Indonesia adalah berkurangnya ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian, masalah pekerjaan, keinginan untuk bergabung dengan keluarga, pernikahan, mencari peluang ekonomi yang lebih baik, dan akses terhadap pendidikan (Yusuf & Freytag-Leyer, 2020).

Perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan memiliki kaitan erat dengan kebijakan pembangunan yang cenderung prioritas ke kota (Mukbar, 2009; Hidayat, 2020). Perkembangan di kota-kota besar, yang berperan sebagai titik sentral aktivitas ekonomi, telah memikat warga desa untuk berpindah ke kota guna memanfaatkan peluang kerja yang lebih banyak tersedia. Hal ini semakin diperparah oleh terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Fenomena urbanisasi ini sejalan dengan teori migrasi penduduk yang dikemukakan oleh Ravenstein (1885) dan Todaro (1976). Mereka berpendapat bahwa migrasi penduduk dipicu oleh kesenjangan pendapatan antara wilayah asal dan destinasi. Perbedaan penghasilan yang mencolok antara kawasan rural dan urban mendorong masyarakat pedesaan untuk mengadu nasib di kota demi kehidupan yang lebih sejahtera (Hidayati, 2021).

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan representasi yang terkonstruksi berdasarkan kajian dan konsep ekonomi, yang selanjutnya menggambarkan alur pemikiran dalam proses penelitian untuk memetakan tujuan dan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh realisasi pendapatan daerah, kemiskinan, dan jenis pemerintah terhadap IPM pada tahun 2023.

### Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan jurnal bidang ini, dapat disimpulkan beberapa hipotesis antara lain:

H1: Terdapat pengaruh positif realisasi pendapatan daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan penelitian dari Hidayati *et al.*, (2023) pendapatan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap IPM. Terdapat korelasi positif antara besaran alokasi anggaran yang diterima oleh wilayah kabupaten atau kota dengan tingkat kemajuan pembangunan manusianya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pengelolaan efektif dari lima komponen pendanaan tersebut di masing-masing daerah, yang diarahkan untuk mendorong *economic growth*. Sebagai dampaknya, peningkatan ekonomi tersebut berjalan seiring dengan membaiknya indikator pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, temuan dari Simanjuntak & Mukhlis (2014) kemandirian keuangan daerah, yang merepresentasikan pendapatan daerah, memiliki hubungan positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis mengungkapkan terdapat hubungan searah antara otonomi finansial suatu wilayah dengan taraf hidup penduduknya, yang tercermin dalam IPM. Terbukti dari keswadayaan pengalokasian keuangan daerah memberikan dampak positif yang substansial dan terukur pada IPM. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri menjadi landasan kokoh bagi kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur, Indonesia, dalam memajukan kualitas hidup masyarakatnya.

H2: Terdapat pengaruh negatif kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.

Penemuan dari Muarti, Shafianti, & Sulistianingsih (2024) kemiskinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa untuk setiap penurunan 1 poin pada variabel kemiskinan, dengan asumsi variabel pengangguran konstan, nilai IPM akan meningkat sebesar 0,8940 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang lebih rendah berkorelasi dengan IPM

yang lebih tinggi. Pengaruh kemiskinan terhadap IPM ini signifikan secara statistik, dengan nilai probabilitas 0,0013 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menekankan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan sebagai strategi untuk meningkatkan pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Sejalan dengan itu, penemuan dari Maharani & Yuliana (2023) menyatakan kemiskinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka semakin rendah nilai IPM di daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kemiskinan dapat membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak, yang merupakan komponen utama dalam perhitungan IPM. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan IPM di suatu daerah.

H3: Terdapat pengaruh jenis pemerintah di daerah kabupaten cenderung lebih rendah daripada jenis pemerintah yang ada di kota terhadap IPM.

Menurut studi yang dilakukan oleh Saragih (2022) mengungkapkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pencapaian IPM antara wilayah kabupaten dan kota. Hasil riset menunjukkan bahwa area perkotaan secara berkelanjutan mengungguli daerah kabupaten dalam hal pencapaian IPM. Secara spesifik, rata-rata IPM pemerintah kota mencapai 74,7, sedangkan kabupaten hanya menyentuh angka 65,2. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang mencolok dalam aspek pembangunan sumber daya manusia antara kawasan rural dan urban di negeri ini. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perbedaan ini antara lain ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik di perkotaan, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah, serta aktivitas ekonomi yang lebih dinamis di daerah perkotaan. Temuan ini menekankan urgensi bagi pemerintah untuk mengintensifkan upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah kabupaten yang relatif kurang berkembang. Langkah ini diperlukan guna mempersempit jarak kualitas pembangunan manusia yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

Sejalan dengan itu, penemuan dari Fadilah, Ananda, & Kaluge (2018) terdapat beberapa faktor pengaruh pemerintah kabupaten lebih rendah daripada kota terhadap

IPM sebagai berikut: pertama, fasilitas dan infrastruktur di kota umumnya lebih baik dan memadai dibandingkan di kabupaten, sehingga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih mudah di perkotaan. Kedua, sebagian besar wilayah di Jawa Timur merupakan kabupaten dengan area yang luas, berbeda dengan kota yang lebih padat dan kompak, sehingga pemerataan pembangunan lebih sulit dilakukan di kabupaten. Ketiga, mobilitas masyarakat kota cenderung lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakses berbagai fasilitas pelayanan publik. Keempat, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan di kota memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan di kabupaten, karena fasilitas pendidikan di perkotaan relatif lebih baik. Kelima, pengeluaran untuk infrastruktur juga menunjukkan pengaruh yang berbeda antara kota dan kabupaten terhadap indeks pendidikan dan pendapatan. Secara keseluruhan, perbedaan karakteristik wilayah dan sistem pengelolaan anggaran membuat efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan IPM cenderung lebih rendah di kabupaten dibandingkan di kota.

### METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Kajian ilmiah yang berkualitas ditandai oleh pelaksanaannya yang selaras dengan rancangan studi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, seluruh tahapan penelitian dapat berlangsung secara terstruktur dan efisien. Kesesuaian antara implementasi dan perencanaan ini menjamin bahwa proses pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang tepat dan terarah, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat dalam konteks bidang ilmu yang diteliti. Peneliti menggunakan metode statistik deskriptif sebagai pengantar untuk melihat karakteristik data. Selanjutnya, data akan diolah dengan analisis *Ordinary least square* (OLS).

Data *cross section* yang diperoleh dari data sekunder merupakan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Pengambilan data dilakukan dengan 29 kabupaten dan 9 kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Rentan waktu yang ditentukan berkaitan dengan pemulihan kondisi ekonomi terbaru pasca COVID-19 serta observasi tersebut sudah cukup untuk meminimalkan kesalahan estimasi dan memenuhi asumsi *degree of*

*freedom* (DF). Pengolahan analisis data menggunakan aplikasi stata 17, *evIEWS* 9, dan excel.

Penelitian ini menggunakan IPM sebagai *dependent variable* (Y), sedangkan *independent variable* yang digunakan realisasi pendapatan daerah (X1), kemiskinan (X2), dan dummy (X3). Indikator IPM direpresentasikan melalui pencapaian dalam aspek-aspek fundamental kualitas hidup masyarakat. Sebagai parameter kesejahteraan, indikator ini didasarkan pada tiga aspek utama: harapan hidup dan kesehatan, tingkat edukasi, serta standar kehidupan yang memadai. Skala merupakan satuan yang dipakai dan data diambil dari BPS. Pendapatan daerah mencerminkan total pemasukan yang berhasil dihimpun oleh otoritas setempat dalam rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam satuan milyar rupiah, bersumber dari DJPK.

Selanjutnya, kemiskinan diproxy dari jumlah penduduk yang dianggap miskin jika ketiadaan sumber daya finansial dan kebutuhan mendasar untuk mencapai taraf hidup minimal yang dapat dialami oleh individu maupun kelompok masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan minimnya pemasukan, yang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mencakup pangan, air bersih, sanitasi yang layak, pelayanan kesehatan, tempat bernaung, akses pendidikan, serta informasi. Satuan dalam bentuk ribu jiwa dan sumber data yang diambil dari BPS. Setelah itu, variabel dummy merupakan indikator jenis pemerintahan kota dan desa. Dimana, desa diberi nilai 1 sedangkan kota bernilai 0 (lihat di tabel 3).

Setelah indikator masing-masing variabel telah ditentukan, maka tahap selanjutnya membuat model yang sesuai dengan teknik analisis yang dipakai. Untuk mengetahui, pengaruh *independent variable* terhadap *dependent variable* maka dengan menggunakan analisis *Ordinary Least Square* (OLS) dengan data *cross section* yaitu sebagai berikut (Gujarati, & Porter, 2013):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y_i$  = Indeks Pembangunan Manusia

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi  $X_1$

$\beta_2$  = Koefisien Regresi  $X_2$

$X_1$  = Pendapatan Daerah

$X_2$  = Kemiskinan

$X_3$  = Jenis Pemerintah Daerah

$i$  = Data *cross section* Kabupaten atau Kota  
 $e_{it}$  = *error term*

Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan dua cara alat uji yaitu uji T dan uji F. Menurut Gujarati (2011) fungsi dari uji statistik hipotesis sebagai melihat tingkat signifikansi setiap *independent variable* terhadap *dependent variable* pada model yang telah dibuat. Uji F berfungsi sebagai mengetahui apakah *dependent variable* (Y) dipengaruhi oleh *independent variable* (X). Cara pengujian berdasarkan uji F varians-nya dengan membandingkan  $F_{hitung}$  ( $F_h$ ) dengan  $F_{tabel}$  ( $F_t$ ) pada  $\alpha = 0,05$ . Ketika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$ , yang berarti *independent variable* secara keseluruhan berhasil dijelaskan oleh variasi dari model regresi, seberapa besar dampaknya pada *dependent variable* dan sebaliknya  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka gagal tolak  $H_0$ , yang berarti *independent variable* secara keseluruhan tidak berhasil dijelaskan oleh variasi dari model regresi, seberapa besar dampaknya pada *dependent variable*.

Setelah dilakukan uji F langkah berikutnya adalah uji T. Uji T ini berfungsi sebagai pengujian secara parsial. Proses analisis dalam merumuskan hipotesis pada uji T dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat alpha ( $\alpha = 0,05$ ). Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka tolak  $H_0$ , yang berarti *dependent variable* dapat diterangkan oleh variasi *independent variable* dan adanya pengaruh pada kedua variabel tersebut, sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka gagal tolak  $H_0$ , yang berarti *dependent variable* tidak dapat diterangkan oleh variasi *independent variable* dan tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Analisis Deskriptif Kuantitatif

Berdasarkan tabel 3 yang tersedia, analisis deskriptif tersebut dapat mempertimbangkan untuk membuat model OLS dengan menggunakan IPM sebagai *dependent variable*, sementara RPD (Realisasi Pendapatan Daerah) yang mewakili pendapatan daerah, tingkat kemiskinan, dan variabel dummy sebagai *independent variable*. Dataset ini mencakup 38 observasi, yang memberikan ukuran sampel yang cukup untuk analisis OLS. Variabel IPM memiliki rata-rata 73,68 dengan standar deviasi 5,054, menunjukkan variasi moderat dalam pembangunan manusia di seluruh daerah yang diamati. RPD menunjukkan variabilitas yang sangat tinggi dengan rata-rata

2565,684 dan standar deviasi 1631,935, yang mengindikasikan perbedaan besar dalam pendapatan atau alokasi pembangunan antar daerah. Tingkat kemiskinan juga bervariasi secara signifikan, dengan rata-rata 110,233 dan standar deviasi 68,319, mencerminkan ketimpangan dalam tingkat kemiskinan. Variabel dummy, dengan rata-rata 0,763, menunjukkan bahwa sekitar 76,3% dari observasi memiliki karakteristik tertentu yang diwakili oleh kabupaten. Dalam model OLS, kita dapat menguji hipotesis bahwa peningkatan RPD dan penurunan tingkat kemiskinan berhubungan dengan peningkatan IPM, sementara variabel dummy mungkin menangkap efek dari suatu karakteristik daerah tertentu terhadap IPM.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi *Gauss-Markov* atau sering dikenal sebagai uji asumsi klasik dilakukan sebelum uji regresi. Hasil uji *Gauss-Markov* menunjukkan tingkat probabilitas senilai 0,645297 yang menandakan di atas tingkat alpha (0,05) sehingga tolak  $H_0$  yang berarti data penelitian disimpulkan terdistribusi secara normal. Pada uji multikolinearitas, hasil estimasi menunjukkan data penelitian telah terbebas dari multikolinearitas dibuktikan dari nilai VIF pada variabel independen realisasi pendapatan daerah, kemiskinan, dan dummy secara berturut-turut sebesar 1,361283; 2,421816; 1,834321. Hal tersebut dapat dikatakan  $VIF < 10$  sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya pada uji autokorelasi, hasil pengujian *Breush-Godfrey* menunjukkan probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,2909 yang berarti lebih dari tingkat alpha (0,05), sehingga hipotesis  $H_0$  tidak ditolak. Artinya pada model tersebut tidak terdapat pelanggaran asumsi autokorelasi. Model Glejser digunakan sebagai alat untuk menguji *heteroscedasticity*. Berdasarkan hasil estimasi tingkat probabilitas *Chi-Square* senilai 0,3492 yang berarti lebih dari tingkat signifikan 0,05, maka hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi *heteroscedasticity*. Uji linearitas dilihat melalui tingkat probabilitas *F-statistic* senilai 0,0518 yang berarti lebih dari tingkat signifikansi 0,05, maka terdapat hubungan *independent variable* (X) dengan *dependent variable* (Y) adalah linier.

### Analisis Regresi

Hasil analisis regresi pada gambar 6 diperoleh koefisien regresi yaitu nilai konstanta (c) = 78,40125;  $X_1 = 0,001386$ ;  $X_2 = -0,039018$ ;  $X_3 = -5,209714$  maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  $IPM = 78,40125 + 0,001386 RPD -$

0,039018 Kemiskinan – 5,209714 Dummy. Temuan studi ini mengindikasikan adanya korelasi searah dan signifikan terhadap IPM. Analisis statistik pada variabel Realisasi Pendapatan Daerah (RPD) memiliki  $t_{hitung}$  senilai 4,091804 (lebih besar dari  $t_{tabel}$  2,032) atau tingkat signifikansi  $0,000 < (\alpha = 0,05)$  dapat dikatakan RPD memiliki pengaruh searah dan signifikan dengan IPM.

Analisis data pada tingkat kemiskinan berkorelasi secara berlawanan dan signifikan terhadap IPM. Hal itu ditunjukkan dari nilai  $t_{hitung}$  -3,615579 pada variabel kemiskinan ( $X_2$ ) yang berarti (lebih kecil dari  $t_{tabel}$  -2,032) atau bisa dilihat dengan tingkat *probability*  $0,0016 < (\alpha = 0,05)$  artinya terdapat korelasi berlawanan dan signifikan antara kemiskinan dengan IPM. Lebih lanjut, studi ini juga menemukan jenis pemerintah daerah berkorelasi berlawanan secara signifikan dengan IPM. Hal tersebut terlihat dari  $t_{hitung}$  senilai -3,406542 (lebih kecil dari  $t_{tabel}$  -2,032) atau dengan membandingkan *probability value*  $0,0017 < (\alpha = 0,05)$  artinya bahwa variabel jenis pemerintah daerah ( $X_3$ ) berkorelasi secara berlawanan dan signifikan terhadap IPM.

### Interpretasi Model Hasil Regresi

Interpretasi model ditunjukkan dari  $\beta_0 = 78,40125$ , pada hasil regresi menyatakan nilai konstanta ( $\beta_0$ ) sebesar 78,40125. Artinya apabila realisasi pendapatan daerah, kemiskinan, dan dummy sama dengan nol, maka besarnya tingkat IPM adalah sebesar 78,40125. koefisien  $\beta_1 = 0,001386$ , artinya apabila kenaikan RPD 1 persen maka akan menaikkan IPM sebesar 0,001386. Realisasi pendapatan daerah yang meningkat menunjukkan IPM yang meningkat. Hal ini dapat diartikan semakin tingginya realisasi pendapatan daerah maka akan meningkatkan IPM, sehingga semakin baik kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, koefisien  $\beta_2 = -0,039018$ , artinya apabila kenaikan kemiskinan 1 persen maka akan menurunkan IPM sebesar 0,039018. Kemiskinan yang meningkat menunjukkan IPM yang menurun. Hal ini dapat diartikan semakin tingginya kemiskinan maka akan menurunkan IPM, sehingga semakin buruk kualitas sumber daya manusia. Koefisien  $\beta_3 = -5,209714$ , artinya pengaruh jenis pemerintah kabupaten cenderung lebih rendah sebesar 5,209714 daripada jenis pemerintah kota.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dan Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

*Adjusted R-squared* senilai 0,70 (70%) mengantung arti bahwa *dependent variable* IPM dapat dijelaskan oleh *independent variable* RPD, Kemiskinan, Dummy,

sedangkan sisanya ( $100\% - 70\% = 30\%$ ) dijelaskan oleh *additional variable* di luar model. Selanjutnya, penentuan uji F yang dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  atau dengan membandingkan alpha dengan tingkat signifikansi 5%. Penentuan tersebut diawali dengan nilai *degree of freedom* (DF) sebesar  $k - 1 = 4 - 1 = 3$  pada df 1, k merupakan jumlah semua variabel dalam model. Kemudian, penentuan df2  $N - K = 38 - 4 = 34$ , N merupakan jumlah observasi. Dari tabel statistik, diperoleh bahwa  $F_{tabel} = 2,88 (> F_{tabel} = 26.59644)$  atau bisa dilihat dari tingkat *probability*  $0,000 < (\alpha = 0,05)$ , sehingga tolak  $H_0$  yang dinyatakan adanya pengaruh secara bersama-sama dari *independent variable* terhadap *dependent variable*.

## Diskusi

### Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap IPM

Pendapatan daerah secara signifikan memiliki korelasi yang searah pada IPM. Peningkatan penerimaan keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor-sektor kunci seperti kesehatan, prasarana atau infrastruktur, dan edukasi. Dalam bidang edukasi, dana dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan kualitas pengajaran, yang berkontribusi pada komponen pengetahuan IPM (Sasana, 2012). Di sektor kesehatan, investasi dapat dilakukan untuk memperbaiki fasilitas dan layanan kesehatan, meningkatkan angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan dalam IPM. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Selain itu, pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan investasi dalam riset dan pengembangan (Mirza, 2012). Semua ini secara kolektif berkontribusi pada peningkatan tiga komponen utama IPM: kesehatan, edukasi, dan standar hidup layak, yang dapat memajukan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun banyak penelitian menunjukkan hubungan positif antara pendapatan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terdapat studi menemukan hasil yang berbeda. Salah satunya, penelitian oleh Badrudin & Khasanah, (2011) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu mempunyai korelasi yang signifikansi terhadap IPM di beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini menekankan pentingnya tidak hanya meningkatkan

pendapatan daerah, tetapi juga memastikan pengelolaan yang efektif dan distribusi yang merata untuk benar-benar memajukan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dalam IPM.

### **Pengaruh Kemiskinan Terhadap IPM**

Studi dari Abdelina & Saryani (2021) menemukan kemiskinan memiliki korelasi yang signifikan dan berlawanan terhadap IPM di Kota Padangsidimpuan. Kemiskinan secara langsung mempengaruhi kualitas pembangunan sumber daya manusia-nya yang terwakilkan pada IPM, dimana semakin buruk keadaan ekonomi seseorang, maka semakin rendah pula mutu sumber daya manusia yang dihasilkan. Tingkat kesejahteraan ekonomi seseorang berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Individu yang hidup dalam keterbatasan finansial seringkali terpaksa mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok dibandingkan investasi jangka panjang untuk pengembangan diri. Keseharian mereka didominasi oleh usaha memenuhi kebutuhan mendesak, sehingga peluang untuk mengenyam pendidikan lanjutan atau mengasah keterampilan baru menjadi sangat terbatas. Akibatnya, potensi pengembangan diri yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka pun sulit terealisasi.

Sejalan dengan itu, Maharani, et al., (2023) menemukan hubungan antara kedua variabel ini bersifat negatif, yang mengindikasikan bahwa semakin besar persentase penduduk yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit, semakin rendah pula nilai IPM. Dengan kata lain, peningkatan kemiskinan akan menyebabkan penurunan pada IPM. Penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembangunan manusia di suatu daerah. Oleh karena itu, strategi penanggulangan hidup pada penduduk yang kesulitan *financial* seharusnya menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan. Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam mendorong peningkatan taraf hidup penduduk, yang nantinya akan terefleksikan melalui kenaikan skor IPM. Disisi lain, Tingginya angka kemiskinan bisa mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di bidang sarana dan prasarana, edukasi, dan kesehatan yang bisa berefek positif pada IPM (Anand & Sen, 2017).

### **Pengaruh Jenis Pemerintah Terhadap IPM**

Pengaruh pemerintah kabupaten terhadap IPM cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kota, yang disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, daerah kabupaten umumnya memiliki infrastruktur yang kurang berkembang dibandingkan daerah perkotaan, yang dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kedua, kabupaten sering menghadapi tantangan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk area yang lebih luas dan tersebar. Selain itu, tingkat urbanisasi yang lebih rendah di kabupaten dibandingkan kota dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas pemerintahan, di mana pemerintah kabupaten mungkin memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang lebih terbatas dibandingkan pemerintah kota.

### KESIMPULAN

Studi menemukan bahwa ternyata pendapatan daerah berkorelasi searah dengan IPM di Wilayah Jawa Timur, baik di tingkat kabupaten maupun kota, selama tahun 2023. Di sisi lain, tingkat kemiskinan terbukti secara signifikan menurunkan skor IPM. Analisa lebih lanjut mengungkapkan adanya kesenjangan yang nyata antara daerah perkotaan dan pedesaan, dimana IPM di wilayah urban cenderung lebih unggul. Akibatnya, kinerja pemerintah kabupaten dalam hal pembangunan manusia cenderung tertinggal dibandingkan dengan pemerintah kota.

### IMPLIKASI KEBIJAKAN

Demi meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah daerah perlu berkomitmen dalam pengembangan mutu sumber daya manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui perbaikan sektor pelayanan kesehatan, edukasi, dan penciptaan lapangan kerja. Bersamaan dengan itu, perluasan pasar bagi produk lokal juga penting guna meningkatkan penghasilan penduduk, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya standar hidup yang memadai.

Dalam merancang strategi dan program pembangunan, aspek kemiskinan harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif. Di Jawa Timur, upaya peningkatan IPM harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khusus pada kawasan terpencil yang memerlukan intervensi lebih intensif. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi krusial. Hal ini melibatkan

partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta sebagai mitra dalam proses pembangunan, serta menjunjung tinggi transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### KETERBATASAN STUDI

Peneliti mengakui adanya sejumlah keterbatasan dalam studi ini, baik dari segi pemilihan variabel maupun rentang waktu yang dijadikan objek penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis hanya mencangkup sebagian faktor yang berpengaruh, sehingga masih terbuka peluang untuk mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang potensial dalam penelitian mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdelina, & Saryani, L. (2021). Poverty Factor Analysis and Economic Growth Against the Index Human Development ( Ipm ) in Padangsidempuan City. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(3), 18–28.
- Anand, S., & Sen, A. (2017). Human development and economic sustainability. *Sustainability*, 28(12), 421–441. <https://doi.org/10.4324/9781315241951-37>
- Asadullah, M. N., Mansor, N., & Savoia, A. (2021). Understanding a “Development Miracle”: Poverty Reduction and Human Development in Malaysia Since the 1970s. *Journal of Human Development and Capabilities*, 22(4), 551–576. <https://doi.org/10.1080/19452829.2021.1975664>
- Asprino, T. (2017). Jurnal kompilek. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, 3(2), 57–68.
- Badan Pusat Statistik. (2024, May 20). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2023. *Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Volume 6*. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/publication/2024/05/20/6db5b563181355d2c47485e1/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-jawa-timur-2023.html>
- Badrudin, R., & Khasanah, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, 9(1), 1–82.
- Desmawati, A., Zamzami, Z., & Zulgani, Z. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i1.2638>
- Dewi, N. L. S. & Sutrisna, I. K. (2012). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3, No. 3, 106–114. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/8161>
- Fadilah, A., Ananda, C. F., & Kaluge, D. (2018). A Panel Approach: How Does Government Expenditure Influence Human Development Index? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(2), 130–139. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.17977/um002v10i22018p130>
- Gujarati, D.N & Porter, D. C. (2013). *Basic Econometrics. Introductory Econometrics: A Practical Approach*.
- Gujarati, D. (2011). *Econometrics By Example*. Houndmills: Macmillan Publishers Limited.
- Hidayat, N. (2020). Fenomena Migrasi Dan Urban Bias di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 12(01), 245. <https://doi.org/10.24114/jg.v12i01.16236>

- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>
- Hidayati, S. W. N., Subiyantoro, E., & Burhan, M. (2023). The Influence of Regional Income on Economic Growth and its Implications for the Human Development Index in East Java. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(09), 4436–4441. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i9-32>
- Irviani, R., Jatiningrum, C., & Kasmi, K. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/ja.v11i1.8925>
- Kroll, C. (2015). Global Development and Happiness: How Can Data on Subjective Well-Being Inform Development Theory and Practice? *Oxford Development Studies*, 43(3), 281–309. <https://doi.org/10.1080/13600818.2015.1067293>
- Latupeirissa, Sanlly J., Djami, R. J. (2010). PEMODELAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA AMBON MENGGUNAKAN METODE STEPWISE. *Variance: Journal of Statistics and Its Applications*, 2, 45–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/variancevol2iss1page45-52>
- Maharani, J., & Yuliana, I. (2023). Effect of Unemployment Rate, Education on Human Development Index which is Mediated by Poverty. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(05), 2191–2198. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i5-37>
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 2–15. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/474>
- Muarti, A., Shafarianti, A., & Sulistianingsih, E. (2024). Analysis of Poverty and Unemployment on Human Development Index in West Kalimantan in 2020-2022. *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)*, 3(2), 29–39. <https://doi.org/10.57059/formasi.v3i2.61>
- Mukbar, D. (2009). *Kebijakan Terkait Migrasi dan Pola Migrasi*. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/553/kebijakan-terkait-migrasi-dan-pola-migrasi>
- Nufus, S. H., & Yazid, M. (2023). Analysis Of Islamic Financial Institutions On Poverty In Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 14(2), 13–18.
- Putra, D. M., & Ratnasari, V. (2015). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ridge. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 4(2). Retrieved from [https://ejournal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/10450](https://ejournal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10450)
- Salsabila, S., Sri Agustin, A., Kirana Wijayanti, S., & Kustiawati, D. (2022). Analisis Penerapan Deret Ukur dalam Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1297–1304. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.484>
- Saragih, J. (2022). Local Government Capital Expenditure, Internal Supervision, Wealth and Human Development: Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 89–106. <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.23562>
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1),

- 1–12.
- Setiawan, M. B. & Hakim, A. (2008). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA. *Jurnal Economia Review of Business and Economics Studies*, Vol. 9, No., 18–26. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1373/1178>
- Shi, Z., & Tang, X. (2020). Exploring the New Era: An Empirical Analysis of China's Regional HDI Development. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(9), 1957–1970. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1684255>
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2014). Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic. *International Journal of Economics and Finance*, 7(1), 192–202. <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n1p192>
- Siswati, E., & Hermawati, D. T. (2018). ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 93–114. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/jisa1822018531>
- Sukandi, & Mujahid, G. (2015). Internal Migration in Indonesia. *UNFPA Indonesia Monograph Series No.3*, xii, 90. Retrieved from [http://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FA\\_Isi\\_BUKU\\_Monograph\\_Internal\\_Migration\\_ENG.pdf](http://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FA_Isi_BUKU_Monograph_Internal_Migration_ENG.pdf)
- Susanti, Hera & Damayanti, A. (2015). *Internal Migration in Indonesia: Duration and Factors*. Depok.
- Todaro, Michael P., Smith, S. C. (2017). *Economic Development. Routledge Handbook of Marxian Economics*. <https://doi.org/10.4324/9781315774206-29>
- UNDP. (2004). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Retrieved from <https://www.newsindo.com/beasiswa/undp1.pdf>
- UNDP. (2010). Human Development Report 2010 The Real Wealth of Nations : Pathways to Human Development. *Human Development*, 21, 238. Retrieved from [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2010\\_EN\\_Complete\\_reprint.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf)
- Villar, A. (2023). Welfare Poverty Measurement. *Journal of Human Development and Capabilities*, 24(2), 147–162. <https://doi.org/10.1080/19452829.2023.2199974>
- Wajdi, N., Mulder, C. H., & Adioetomo, S. M. (2017). Inter-regional migration in Indonesia: a micro approach. *Journal of Population Research*, 34(3), 253–277. <https://doi.org/10.1007/s12546-017-9191-6>
- Yusuf, D., & Freytag-Leyer, B. (2020). Causes and effects of woman rural-urban migration – field study amongst female street food vendors in Tangerang-Indonesia and Hat Yai. *21st International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2020”. Home Economics, Marketing and Sustainable Consumption, Integrated and Sustainable Regional Development, New Dimensions in the Development of Society.*, 54(54), 13–20. <https://doi.org/10.22616/esrd.2020.54.001>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

**TABEL**

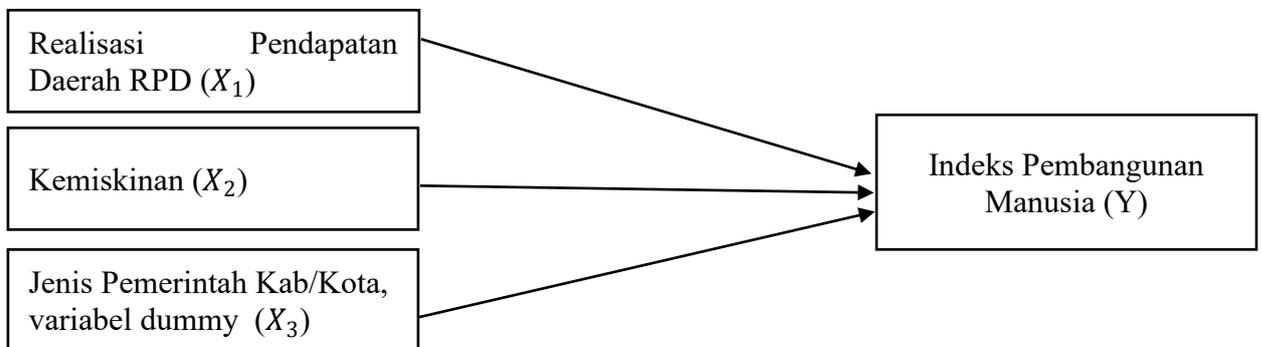
Tabel 1. Data Penelitian

Kabupaten/Kota	IPM	RPD	Kemiskinan	Dummy
Kabupaten Pacitan	70.19	1580.71	76.2	1
Kabupaten Ponorogo	72.5	1874.42	83.71	1
Kabupaten Trenggalek	71.73	1879.86	74.58	1
Kabupaten Tulungagung	74.61	2842.99	68.81	1
Kabupaten Blitar	72.49	2515.75	101.94	1
Kabupaten Kediri	73.96	2598.31	171.18	1
Kabupaten Malang	72.16	4654.4	251.36	1
Kabupaten Lumajang	67.87	2157.48	93.82	1
Kabupaten Jember	68.64	3164.95	236.46	1
Kabupaten Banyuwangi	72.61	3374.67	119.52	1
Kabupaten Bondowoso	67.99	1727.43	105.13	1
Kabupaten Situbondo	69.16	1815.04	82.62	1
Kabupaten Probolinggo	67.79	1790.97	205.02	1
Kabupaten Pasuruan	70.29	3582.84	154.09	1
Kabupaten Sidoarjo	81.55	5020.2	119.15	1
Kabupaten Mojokerto	75.53	2608.55	112.86	1
Kabupaten Jombang	74.6	2721.84	117.36	1
Kabupaten Nganjuk	73.71	1991.41	115.86	1
Kabupaten Madiun	72.97	2097.56	75.87	1
Kabupaten Magetan	75.41	1913.1	62.49	1
Kabupaten Ngawi	72.47	2404.08	121.3	1
Kabupaten Bojonegoro	70.85	6011.12	153.25	1
Kabupaten Tuban	70.34	2956.7	177.25	1
Kabupaten Lamongan	74.53	3209.62	149.94	1
Kabupaten Gresik	77.98	3417.51	149.75	1
Kabupaten Bangkalan	65.75	2387.84	196.66	1
Kabupaten Sampang	64.13	2021.35	221.71	1
Kabupaten Pamekasan	67.96	1949.53	126.43	1
Kabupaten Sumenep	68.61	2508.15	206.1	1
Kota Kediri	80.44	1478.07	21.03	0
Kota Blitar	80.63	897.69	10.61	0
Kota Malang	83.39	2072.9	37.78	0
Kota Probolinggo	75.43	968.43	15.86	0
Kota Pasuruan	77.17	772.45	13.56	0
Kota Mojokerto	80.07	806.5	7.65	0
Kota Madiun	82.71	1117.81	8.46	0
Kota Surabaya	83.45	9604.78	136.37	0
Kota Batu	78.18	999	7.1	0

Tabel 2. Pemeringkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)

Peringkat	Kabupaten/Kota	IPM
1	Kota Surabaya	83.45
2	Kota Malang	83.39
3	Kota Madiun	82.71
4	Kabupaten Sidoarjo	81.55
5	Kota Blitar	80.63
6	Kota Kediri	80.44
7	Kota Mojokerto	80.07
8	Kota Batu	78.18
9	Kabupaten Gresik	77.98
10	Kota Pasuruan	77.17
11	Kabupaten Mojokerto	75.53

12	Kota Probolinggo	75.43
13	Kabupaten Magetan	75.41
14	Kabupaten Tulungagung	74.61
15	Kabupaten Jombang	74.6
16	Kabupaten Lamongan	74.53
17	Kabupaten Kediri	73.96
18	Kabupaten Nganjuk	73.71
19	Kabupaten Madiun	72.97
20	Kabupaten Banyuwangi	72.61
21	Kabupaten Ponorogo	72.5
22	Kabupaten Blitar	72.49
23	Kabupaten Ngawi	72.47
24	Kabupaten Malang	72.16
25	Kabupaten Trenggalek	71.73
26	Kabupaten Bojonegoro	70.85
27	Kabupaten Tuban	70.34
28	Kabupaten Pasuruan	70.29
29	Kabupaten Pacitan	70.19
30	Kabupaten Situbondo	69.16
31	Kabupaten Jember	68.64
32	Kabupaten Sumenep	68.61
33	Kabupaten Bondowoso	67.99
34	Kabupaten Pamekasan	67.96
35	Kabupaten Lumajang	67.87
36	Kabupaten Probolinggo	67.79
37	Kabupaten Bangkalan	65.75
38	Kabupaten Sampang	64.13



Gambar 1. Kerangka Konseptual

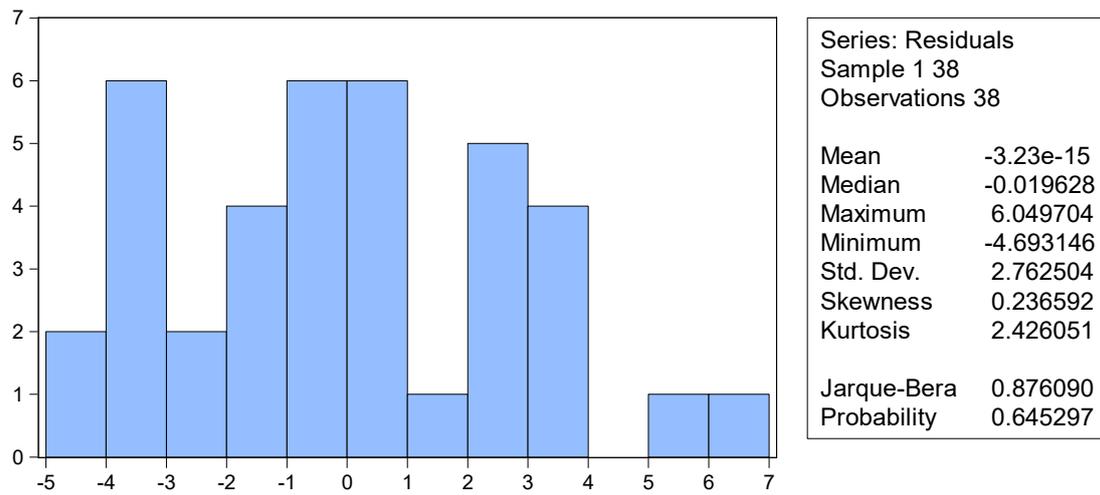
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Keterangan	Sumber
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran dari capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Satuan yang dipakai adalah angka.	Badan Pusat Statistik (BPS)
Pendapatan Daerah (PD)	Jumlah pendapatan daerah yang berhasil diterima atau dikumpulkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode anggaran tertentu. Satuan dalam bentuk	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

	milyar rupiah.	
Kemiskinan (Pov)	Jumlah penduduk miskin diukur dari jumlah penduduk yang dianggap miskin jika secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, yang diukur berdasarkan pengeluaran. Dengan kata lain, penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Satuan dalam bentuk ribu jiwa.	Badan Pusat Statistik (BPS)
Dummy (D)	Variabel dummy merupakan indikator jenis pemerintahan kota dan desa. Dimana, desa diberi nilai 1 sedangkan kota bernilai 0.	Jenis pemerintah dari data yang tersedia

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif

	N	Mean	Median	SD	Min	Max
ipm	38	73.68	72.790	5.054	64.13	83.45
rpd	38	2565.684	2127.520	1631.935	772.45	9604.78
kemiskinan	38	110.233	114.360	68.319	7.1	251.36
dummy	38	.763	1.000	.431	0	1



Gambar 2. Uji Normalitas

Variance Inflation Factors  
Date: 07/10/24 Time: 23:17  
Sample: 1 38  
Included observations: 38

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
RPD	1.15E-07	4.816944	1.361283
KEMISKINAN	0.000116	8.897036	2.421816
DUMMY	2.338839	8.167135	1.934321
C	1.299344	5.945372	NA

Gambar 3. Uji Multikolinearitas

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.111997	Prob. F(2,32)	0.3413
Obs*R-squared	2.469371	Prob. Chi-Square(2)	0.2909

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/10/24 Time: 23:18

Sample: 1 38

Included observations: 38

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RPD	-0.000108	0.000353	-0.305940	0.7616
KEMISKINAN	0.002346	0.010933	0.214594	0.8314
DUMMY	-0.163150	1.529224	-0.106688	0.9157
C	0.160814	1.144349	0.140529	0.8891
RESID(-1)	0.181560	0.180771	1.004366	0.3227
RESID(-2)	-0.216504	0.176104	-1.229413	0.2279
R-squared	0.064983	Mean dependent var	-3.23E-15	
Adjusted R-squared	-0.081113	S.D. dependent var	2.762504	
S.E. of regression	2.872357	Akaike info criterion	5.092082	
Sum squared resid	264.0139	Schwarz criterion	5.350648	
Log likelihood	-90.74956	Hannan-Quinn criter.	5.184078	
F-statistic	0.444799	Durbin-Watson stat	2.023340	
Prob(F-statistic)	0.813789			

Gambar 4. Uji Autokorelasi

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.073882	Prob. F(3,34)	0.3731
Obs*R-squared	3.289014	Prob. Chi-Square(3)	0.3492
Scaled explained SS	2.906896	Prob. Chi-Square(3)	0.4062

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 07/10/24 Time: 23:19

Sample: 1 38

Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.563629	0.652708	2.395604	0.0222
RPD	0.000344	0.000194	1.775869	0.0847
KEMISKINAN	-0.004036	0.006179	-0.653133	0.5181
DUMMY	0.235979	0.875703	0.269474	0.7892
R-squared	0.086553	Mean dependent var	2.182524	
Adjusted R-squared	0.005955	S.D. dependent var	1.655075	
S.E. of regression	1.650140	Akaike info criterion	3.938898	
Sum squared resid	92.58075	Schwarz criterion	4.111276	
Log likelihood	-70.83907	Hannan-Quinn criter.	4.000229	

F-statistic	1.073882	Durbin-Watson stat	1.837545
Prob(F-statistic)	0.373137		

Gambar 5. Uji Heteroskedastisitas

Ramsey RESET Test  
Equation: UNTITLED  
Specification: IPM RPD KEMISKINAN DUMMY C  
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	2.018190	33	0.0518
F-statistic	4.073092	(1, 33)	0.0518
Likelihood ratio	4.422587	1	0.0355

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	31.02223	1	31.02223
Restricted SSR	282.3628	34	8.304789
Unrestricted SSR	251.3406	33	7.616382

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-92.02619	34
Unrestricted LogL	-89.81490	33

Gambar 6. Uji Linearitas

Dependent Variable: IPM  
Method: Least Squares  
Date: 07/10/24 Time: 23:16  
Sample: 1 38  
Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RPD	0.001386	0.000339	4.091804	0.0002
KEMISKINAN	-0.039018	0.010792	-3.615579	0.0010
DUMMY	g-5.209714	1.529326	-3.406542	0.0017
C	78.40125	1.139888	68.77981	0.0000
R-squared	0.701202	Mean dependent var		73.68026
Adjusted R-squared	0.674838	S.D. dependent var		5.053755
S.E. of regression	2.881803	Akaike info criterion		5.054010
Sum squared resid	282.3628	Schwarz criterion		5.226388
Log likelihood	-92.02619	Hannan-Quinn criter.		5.115341
F-statistic	26.59644	Durbin-Watson stat		1.700835
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 7. Hasil Regresi

---

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.837378155
R Square	0.701202174
Adjusted R Square	0.67483766
Standard Error	2.88180315
Observations	38

---

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	3	662.6334579	220.8778	26.59644	4.85813E-09
Residual	34	282.3628394	8.304789		
Total	37	944.9962974			

---

Gambar 8. Hasil ANOVA